



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	:	2009-2010
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	Komisi D DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 22 Juli 2010
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	:	Audiensi/ Penyampaian Aspirasi tentang program Jamkesmas
Ketua Rapat	:	Dr. Ahmad Nizar Shihab, SpAn/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum /Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota Hadir	:	24 Orang Anggota Komisi IX DPR RI, dan 5 Orang Anggota Izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Komisi D DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta dibuka pukul 10.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah Pimpinan membuka rapat diperkenalkan Anggota Komisi IX DPR RI yang baru, yakni:

1. Bapak Drs.H. Imam Soeroso, MM dari Fraksi PDI-P;
2. Ibu Dra. Eddy Mihaty, MSi dari Fraksi PDI-P;
3. Bapak H. Anshory Siregar, Lc dari Fraksi PKS;
4. Bapak Drs. M. Martri Agoeng dari Fraksi PKS.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Program Jaminan Kesehatan di Provinsi D.I.Yogyakarta sudah berjalan selama 5 (lima) tahun, sejak Tahun 2005 jumlah kepesertaan mengalami perubahan yakni pada Tahun 2005 berjumlah 615 ribu jiwa, pada Tahun 2006 meningkat menjadi 712 ribu jiwa dan pada Tahun 2007 menjadi 942.129 jiwa.

2. DPRD Provinsi D.I.Yogyakarta mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Komisi IX DPR RI agar jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2011 tetap berjumlah 942.129 jiwa.
3. Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta mengusulkan kepada Komisi IX DPR RI agar dalam membahas RUU BPJS ditambahkan materi tentang memberikan peran daerah Provinsi untuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merujuk PP Nomor 38 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bersekala Provinsi.
4. SJSN yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota merupakan perwakilan/cabang dari penyelenggaraan SJSN Pusat.
5. DPRD Provinsi D.I.Yogyakarta menyampaikan kepada Komisi IX DPR RI bahwa data penduduk miskin yang selama ini menjadi acuan dalam kepesertaan Jamkesmas adalah akurat (Nama dan Lokasi) sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan agar anggaran Jaminan Kesehatan untuk orang miskin dan tidak mampu (Jamkesmas) yang jumlahnya 942.129 jiwa pada Tahun 2011 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami perubahan.

Pertemuan diakhiri pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 22 Juli 2010
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, SpAn

Ba